

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur tengah, sepanjang Laut tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan yang berpenduduk kurang dari 4 juta jiwa, Diperkirakan bahwa 59% dari penduduk Lebanon adalah Muslim (Sunni, Syi'ah, dan Druze) dan 39% Kristen dan terdapat pula komunitas kecil Yahudi dan Kurdi. Lebanon mengalami situasi politik yang sangat sensitif, hal ini disebabkan oleh adanya berbagai komunitas religius tersebut yang memiliki orientasi politik untuk mendominasi pemerintahan Lebanon. Oleh sebab itu, sistem politik Lebanon didasarkan pada pemikiran bahwa harus ada keseimbangan dalam semua aspek kehidupan diantara komunitas-komunitas religius, karena apabila keseimbangan ini terganggu maka harmoni kehidupan di Lebanon dan bahkan keutuhan Lebanon sebagai sebuah entitas negara pun dapat terganggu.¹

Sistem politik Lebanon terutama mengamanatkan agar perimbangan antara komunitas-komunitas konfessional dipertahankan di parlemen serta seluruh jajaran pemerintahan. Yang kemudian semua itu diformulasikan dan disahkan dalam Pakta Nasional (*Al-Mithaq Al-Watani*) pada tahun 1943, sebuah kesepakatan tidak tertulis antar Presiden dan Perdana Menteri pertama Lebanon.

¹ Trias Kuncahyono, artikel "Lebanon dan Warisan "Confessionalism" dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0612/18/lapakhirtahun/3174318.htm>.

Pakta Nasional tersebut merupakan sebuah usaha pragmatik untuk meredakan ketegangan diantara sekte-sekte religius yang ada.

Dalam Pakta tersebut dinyatakan bahwa Presiden Libanon harus dari kelompok Kristen Maronit, Perdana Menteri dari golongan Sunni, Ketua Parlemen dari golongan Syi'ah, dan Panglima Angkatan Bersenjata berasal dari golongan Maronit. Pakta Nasional yang menegaskan bahwa kursi-kursi di Parlemen harus dialokasikan berdasarkan atas agama dan wilayah dengan perbandingan 6 Kristen dan 5 muslim. Perbandingan ini ditentukan berdasarkan atas sensus penduduk tahun 1932 yang dilakukan pada saat jumlah Kristen sedikit lebih besar, sistem politik semacam inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu pecahnya perang saudara pada kurun waktu 1975-1990. Meskipun apa yang terjadi di Libanon bukan perang saudara murni karena adanya berbagai pihak luar yang terlibat di dalamnya.

Dan upaya yang dilakukan pada saat itu untuk mengakhiri konflik yang terjadi adalah melalui perundingan yang diadakan di Taif, Arab Saudi dimulai pada September 1989 sampai terjadinya Perjanjian Taif (*Taif Agreement*) pada 22 Oktober 1989. Perjanjian ini terdiri atas empat prinsip yaitu, melakukan Reformasi politik di Libanon, membangun hubungan khusus antara Libanon dengan Suriah, mengakhiri perang di Libanon dengan melakukan gencatan senjata dan membuat kerangka untuk upaya penarikan mundur pasukan Suriah di Libanon. Tetapi yang paling utama dari perjanjian ini adalah formalisasi Pakta Nasional yang dicantumkan dalam konstitusi Libanon yang menegaskan posisi jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan Libanon.

Perang Lebanon begitu memiliki banyak dimensi, sistem politik Lebanon yang kompleks menjadi pemicu terjadinya krisis politik, tetapi konflik politik yang terjadi di Lebanon bukan murni sebagai perang saudara karena ada pihak dari luar Lebanon yang terlibat di dalamnya diantaranya adalah Suriah, Israel dan PLO serta dari barat yang selalu berusaha untuk memanfaatkan rapuhnya Lebanon sebagai salah satu upaya intervensi terhadap negara-negara di Timur Tengah.²

Polarisasi yang terjadi pada peta politik Lebanon juga menjadi pemicu terjadinya krisis politik. Polarisasi mutakhir di Lebanon adalah adanya dua kubu yang mengusung proyek politik berbeda yang sesungguhnya merupakan bagian dari pertarungan regional dan internasional. Kedua kubu tersebut adalah dari pihak pemerintah sebagai mayoritas yang mendapatkan dukungan dari negara barat dan pihak oposisi dalam hal ini adalah Hizbullah yang mendapatkan dukungan dari Suriah dan Iran. Hasilnya, persoalan Lebanon menjadi sangat rumit, jauh melebihi kapasitas negeri yang hanya berpenduduk sekitar 4 juta jiwa itu. Dua kubu tersebut tidak hanya terlibat koalisi di dalam negeri, tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Pengaruh yang besar dari luar Lebanon yang datang dari negara tetangga yaitu, Suriah dan Iran menambah kompleksitas konflik karena kedekatan historis dari kedua negara tersebut terutama Suriah yang sejak dulu memiliki misi khusus terhadap Lebanon yaitu, *Misi Historis dan Misi Strategis*, misi yang didasarkan

²² “Libanon dan konflik Sektarian”:<http://kainsa.wordpress.com/2007/08/18/libanon-dan-konflik-sektarian/>, Akses tanggal 26 juni 2009.

pada anggapan bahwa Lebanon merupakan bagian tak terpisahkan dari negara “Suriah Raya” serta keinginan Suriah untuk menjadikan Lebanon sebagai negara penyangga (buffer state) guna membatasi serangan-serangan Israel ke Suriah.³

Sedangkan Iran sendiri mencoba untuk menanamkan pengaruh di Lebanon dengan mendukung Hizbullah, karena dengan mendukung Hizbullah Iran dapat mencapai tujuan luar negerinya di timur tengah. Pertama, melawan Israel melalui kekuatan Hizbullah. Kedua, Iran bisa masuk langsung ke Timur Tengah dan memperluas pengaruh syi’ah di Lebanon dengan meningkatnya pengaruh Hizbullah di negeri itu.

Ada hubungan yang saling berkaitan antara Suriah, Syi’ah Lebanon dan Iran. Seluruh bantuan Iran yang berupa fisik harus dikirim melalui Suriah karena tanpa akses yang di berikan oleh Suriah akan sangat sulit bagi Iran untuk menyalurkan bantuan ke Lebanon, sehingga Suriah merupakan jalur keluar masuknya bantuan dari Iran ke Lebanon.⁴

Krisis berkepanjangan pada kurun waktu tahun 1975 sampai tahun 1990 yang terjadi di Lebanon sebenarnya sudah sejak lama mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik dari negara-negara Arab sendiri maupun dari dunia internasional, berbagai upaya mediasi dari pihak ketiga khususnya Liga Arab yang mengusahakan gencatan senjata diantara pihak-pihak yang bertikai di Lebanon

³<http://www.kapanlagi.com/h/0000070568.html>, <http://Sinar Harapan.com>, akses tanggal 02april 2009.

⁴“Penjelasan Krisis Politik Lebanon”:<http://www.acehforum.or.id/penjelasan-krisis-politik-t4242.html?s=ecb99c0c42553088bdfac68a611f375&p=29907>, akses tanggal 22 juni 2009.

pun telah dilakukan dan bahkan Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan berbagai Resolusi sejak awal terjadinya konflik di negara tersebut dan hampir semua resolusi bisa dikatakan dapat di jalankan kecuali resolusi tentang pembubaran milisi Hizbullah karena sampai sekarang militan Hizbullah masih tetap eksis di Libanon. Upaya diplomatik regional oleh pelaku utama faksi yang bertikai hanya menghasilkan wacana selama beberapa waktu terakhir, namun berbagai pihak khususnya Liga Arab dan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur tengah sebagai langkah mediasi terus menerus mengupayakan adanya adanya kompromi politik diantara pihak-pihak yang bertikai di Libanon.

Pada awalnya Hizbullah sendiri merupakan kelompok Syiah Lebanon yang muncul dan menguat pasca-revolusi Islam Iran (lahir tahun 1983), kemudian dewasa ini posisi Hizbullah sendiri menguat pasca-konflik dengan Israel pertengahan tahun 2006 dengan Iran merupakan pendukung utama Hezbollah sekaligus pemasok senjata dan dana. Hizbullah menguasai kawasan Lebanon Selatan dan secara konsisten menggunakan wilayah tersebut sebagai basis perlawanan terhadap Israel, bahkan Hizbullah juga mendapatkan dukungan dari Suriah yang sekaligus merupakan penghubung mereka dengan Iran, Kontrol Hizbullah atas wilayah Lebanon Selatan dimungkinkan karena lemahnya kemampuan pemerintah Lebanon yang terkoyak akibat perang saudara dan kuatnya intervensi Suriah yang mendorong penguatan Hizbollah. Sehingga, Hizbullah dianggap sebagai cermin gerakan perlawanan di bagian besar dunia Arab dan Muslim dunia. Namun demikian, kelompok ini dianggap sebagai organisasi teroris oleh pihak barat. Pada awalnya para pemimpin Hizbullah

mengatakan bahwa gerakan ini bukanlah sebagai sebuah organisasi, oleh karena itu tidak mempunyai kartu anggota, hirarki kepemimpinan dan struktur organisasi yang jelas, selanjutnya Hizbullah berkembang menjadi sebuah organisasi politik yang mempunyai peranan vital dalam konstelasi politik di Libanon. Karena selain memiliki kekuatan milisi yang dominan, Hizbullah juga mempunyai kedudukan utama dalam komposisi Pemerintahan Libanon. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 2006 dimana Hizbullah meraih 10 persen suara sehingga wakilnya menduduki 14 kursi dari 128 kursi yang tersedia di parlemen.⁵

Krisis di Libanon muncul kembali karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, pemerintahan Siniora dan Koalisi 14 Maret mendukung pembentukan Mahkamah Internasional dalam kasus terbunuhnya mantan Perdana Menteri Libanon Rafik Hariri, Hariri dibunuh karena menjadi tokoh penentang Suriah yang mengakibatkan militer negara Suriah dipaksa keluar dari Libanon tahun 2004. Sementara itu, oposisi dari koalisi 14 Maret adalah Koalisi 8 Maret yang terdiri dari Hizbullah, Syi'ah, dan kelompok Kristen pimpinan Michel Aoun yang didukung oleh Suriah dan Iran. Koalisi ini menentang pembentukan Mahkamah Internasional tersebut, dan menganggapnya sebagai campur tangan kekuatan asing di Libanon. Kedua, Siniora dan Koalisi 14 Maret menolak tuntutan Koalisi 8 Maret yang dimotori oleh kelompok Hizbullah atas jatuhnya sepertiga kursi dewan menteri. Bagi Koalisi 14 Maret, menerima tuntutan itu sama halnya menyerahkan pemerintah Libanon. Padahal Koalisi 8

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Doha_Agreement, akses tanggal 30 maret 2009.

Maret ini didukung oleh Presiden Emile Lahoud yang pro Suriah, dan Ketua Parlemen Nabih Berri yang juga ketua Partai Amal Syi'ah. Namun, politik Lebanon tidak hanya dipengaruhi faktor dalam negeri, faktor luar negeri juga ikut mendominasi. Kubu pro-Suriah membentuk poros Suriah dan Iran, sedangkan kubu anti-Suriah membentuk poros Amerika Serikat dan Perancis. Kubu pro-Suriah sangat membutuhkan dukungan Suriah dan Iran untuk menghadapi agresi Israel. Sebaliknya, kubu anti-Suriah membutuhkan Amerika Serikat dan Perancis untuk mempertahankan kekuatan politik dalam negeri mereka.

Krisis politik di Libanon mencapai puncaknya ketika pada pertengahan bulan Mei 2008 pemerintah Libanon mengeluarkan dua kebijakan yang berisi tentang pembekuan sarana komunikasi Hizbullah dan pemberhentian kepala keamanan bandara internasional Rafik Hariri (yang dekat dengan Hizbullah) yang menimbulkan kemarahan dari Hizbullah yang mengakibatkan terjadinya bentrok antara koalisi oposisi yang di motori Hizbullah dengan kelompok milisi pendukung koalisi partai-partai yang berkuasa atau kelompok mayoritas yang berlangsung selama kurang lebih sepekan di kota Beirut, bahkan kerusuhan sampai meluas ke pegunungan Libanon (*Pegunungan Ahad*) sampai ke wilayah utara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa lebih dari 300 orang serta menyebabkan kelumpuhan total di Beirut. Dalam kontak senjata tersebut milisi oposisi keluar sebagai pemenang dengan keberhasilannya menduduki Beirut sebagai bukti bahwa milisi Hizbullah merupakan kekuatan militer yang masih sangat dominan di Libanon.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat di ambil suatu permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Pengelolaan Konflik antara pemerintah Libanon dengan Hizbullah pada tahun 2008?”

C. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Konflik yang terjadi di Libanon dapat kita pahami dari prespektif konflik etnis.⁶ Sebuah teori yang di ungkapkan oleh Ted Robert Gurr yang menyatakan bahwa Tuntutan dari kelompok politik yang berbasis pada etnis atau identitas kultural seperti suku, agama, ras dsb biasanya hanya termotivasi semata-mata pada kepentingan kelompoknya saja, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bahkan untuk kekuasaan sebagai penyebab utama terjadinya konflik etnis, karena seandainya apabila kelompok tersebut berhasil merealisasikan kepentingannya maka akan memunculkan diskriminasi antar kelompok yang akan memperkeruh situasi.

Dalam hal ini sebuah negara yang memiliki heterogenitas sangat berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik etnis (politis), sebagai sebuah konsekuensi dari idealisme masing-masing kelompok etnis yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya diatas kepentingan negara, dimana

⁶ Chester A. Crorcker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aal, *”The Challenges of Managing Ethnopolitical Conflict”*, United States Institute of Peace press (Washington D.C., 2001) hlm 180-184.

berbagai kontraksi akan muncul karena keragaman visi dan misi masing-masing kelompok yang sering berseberangan dan bahkan identitas kultural sering dijadikan sebagai alat politik bagi pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.⁷

Dari penjelasan tentang definisi, potensi, serta faktor utama penyebab konflik etnis (politis), terdapat teori yang menyatakan tentang 5 mekanisme mereduksi konflik etnis oleh Donald L. Horowitz, yaitu:

Pertama adalah pembagian kekuasaan secara luas agar tidak didominasi oleh satu etnis tertentu, Sebagai mekanisme awal untuk mengurangi sebuah konflik etnopolitik lebih kepada bagaimana porsi kekuasaan dalam suatu negara.

Kedua adalah merubah interethnic conflict menjadi intraethnic conflict, yang bertujuan untuk mengurangi intensitas konflik yang terjadi agar tidak berkembang lebih besar.

Ketiga adalah memberikan insentif bagi kerjasama antar etnis, mengupayakan adanya jalinan hubungan yang lebih erat dengan kerjasama antar etnis.

Keempat adalah penempatan seseorang dalam sebuah jabatan berdasarkan atas kepentingan (profesionalitas) bukan berdasarkan atas etnisitas.

Kelima adalah mengurangi disparitas antar kelompok etnis. Mengurangi kesenjangan antar etnis dalam bidang politik yang merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik etnis.

⁷ Donald L. Horowitz, "*Ethnic Groups in Conflict*", University of California press (Berkeley, 1985) hlm 597-599.

Libanon memiliki kriteria sebagai sebuah negara yang heterogen, berbagai kontraksi akan timbul karena idealisme (etnisitas) yang diusung oleh masing-masing pihak untuk saling mendominasi satu sama lain baik dalam kehidupan sosial masyarakat atau bahkan dalam institusi pemerintahan, sehingga memunculkan sebuah kompetisi yang berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik.⁸

Sebuah teori yang diungkapkan oleh Michael E. Brown menyatakan pandangan umum tentang pengaruh asing terhadap konflik etnis dalam suatu negara, dimana sebuah konflik yang berbasis pada identitas kultural berakar pada kebencian yang diwariskan dari masa lalu yang partikular, sehingga kebijakan yang umum dilakukan adalah dengan menarik diri dari konflik serta melihat bagaimana konflik berjalan dan mengakhiri dirinya sendiri. Di samping itu ada beberapa aspek juga bisa memperbesar skala kekerasan di dalam konflik yang tengah terjadi. Aspek-aspek tersebut juga seringkali merupakan hasil dari pengaruh "*kekuatan asing*" di luar etnis-etnis yang tengah berseteru, sehingga cara yang paling tepat untuk menghadapi konflik antar etnis adalah dengan menanganinya sedini mungkin, sebelum masalah menjadi semakin rumit, dan kekerasan yang lebih besar terjadi. Lebih dari itu, pencegahan terjadinya konflik etnis jauh lebih baik daripada berusaha menyelesaikan apa yang telah terjadi.

Sejak awal kemerdekaannya tahun 1943 pemerintah Libanon sebenarnya sudah berusaha untuk mengakomodasi heterogenitas yang ada di negara tersebut,

⁸ "Knowledge is Power" Memahami seluk beluk Konflik Etnis bersama Michael E. Brown": "*knowledge is power*" <http://rezaantonius.multiply.com/journal/item/185>, Akses tanggal 27 Juni 2009.

yang pertama adalah melalui sebuah kesepakatan tidak tertulis antara pemimpin Libanon pada waktu itu yang dikenal sebagai Pakta Nasional kemudian diformalisasikan dalam Perjanjian Taif tahun 1989 dan yang terakhir adalah Perjanjian Doha tahun 2008.

D. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan teori yang telah di jelaskan, maka pengelolaan konflik yang di lakukan adalah:

1. Pembagian kekuasaan secara luas agar tidak didominasi oleh satu etnis tertentu.
2. Penempatan seseorang dalam sebuah jabatan berdasarkan atas kepentingan (profesionalitas) bukan berdasarkan atas etnisitas.
3. Menolak Intervensi asing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam konteks skripsi ini penelitian di fokuskan pada obyek pengelolaan konflik di Libanon, dan ketika munculnya kembali konflik di Libanon pada 2006 hingga pertengahan 2008 sampai Perjanjian Doha, tetapi tidak menutup kemungkinan mengambil data tahun-tahun sebelumnya sebagai tinjauan sejarah.

F. Metode Penulisan

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data melalui literatur, jurnal, buku-buku, koran dan beberapa pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk dengan akses berbagai sumber data dari

internet dan kemudian menggunakan metode pengolahan data atau penyajian makalah secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan pembahasan dalam tiap bab akan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam Bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua mengemukakan gambaran umum tentang sejarah Libanon sebagai negara yang rawan terhadap konflik.

Bab Ketiga mengemukakan tentang konflik yang terjadi dan usaha pengelolaannya.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap Pengelolaan konflik yang terjadi di Libanon.

Bab kelima, merupakan Bab akhir yang menutup karya tulis ini, yang berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.

